

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM LAYANAN BAJAK GRATIS DI KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF FREE PLOWING SERVICES: A CASE STUDY OF AGRICULTURAL POLICY IN TANJUNG EMAS, WEST SUMATRA

Alfitrah Indri Rahmadhana¹

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: alfitrahindirahmadhana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2021 yang direvisi menjadi Perbup Nomor 54 Tahun 2022, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Efektivitas kebijakan diukur menggunakan lima dimensi ketepatan (5T) dari Riant Nugroho: Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Pertanian, manajer program tingkat kecamatan, penyuluh pertanian, ketua kelompok tani, dan petani penerima manfaat di Kecamatan Tanjung Emas, dengan fokus pada Nagari Koto Tengah dan Jorong Sungai Salak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini secara umum efektif dalam meringankan beban biaya produksi petani, dengan revisi kebijakan ke arah inklusivitas (menggunakan data SIMLUHTAN) dan struktur pelaksanaan yang terkoordinasi. Namun, beberapa hambatan mengganggu efektivitas optimal. Program belum sepenuhnya Tepat Lingkungan karena tidak memiliki strategi mitigasi untuk sawah tadah hujan dan hanya memberikan bantuan satu kali setahun, sehingga sulit mencapai target peningkatan Indeks Pertanaman (IP). Dari aspek Tepat Proses, ditemukan kesenjangan waktu (*time lag*) dalam distribusi bantuan dan konflik persepsi mengenai partisipasi petani. Faktor penghambat lainnya meliputi keterbatasan anggaran yang memengaruhi pola bantuan, serta ketidakmerataan akses di antara anggota kelompok tani. Faktor pendukung utama adalah fleksibilitas pola bantuan dan dukungan aktor lokal. Kesimpulannya, Program Layanan Bajak Gratis telah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani, tetapi belum mencapai efektivitas maksimal. Untuk optimalisasi, diperlukan sinkronisasi jadwal operasional yang lebih baik, mitigasi terhadap kendala lahan tadah hujan, peningkatan transparansi dan komunikasi dengan petani, serta penguatan alokasi anggaran untuk menjaga kualitas dan pemerataan bantuan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Layanan Bajak Gratis, Pertanian, Tanah Datar.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Free Plowing Service Program implementation in Tanjung Emas Subdistrict, Tanah Datar Regency, based on Regent Regulation (Perbup) Number 56 of 2021, revised to Perbup Number 54 of 2022, as well as to identify its supporting and inhibiting factors. Policy effectiveness was measured using Riant Nugroho's five dimensions of precision (5T): Policy Precision, Implementation Precision, Target Precision, Environmental Precision, and Process Precision. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation studies. Research

informants consisted of officials from the Department of Agriculture, subdistrict-level program managers, agricultural extension officers, chairpersons of farmer groups, and beneficiary farmers in Tanjung Emas Subdistrict, focusing on Nagari Koto Tengah and Jorong Sungai Salak. The results indicate that the program is generally effective in reducing the production cost burden for farmers, supported by policy revisions toward inclusivity (utilizing SIMLUHTAN data) and a coordinated implementation structure. However, several obstacles hinder optimal effectiveness. The program is not yet fully Environmentally Precise as it lacks mitigation strategies for rain-fed rice fields and only provides assistance once a year, making it difficult to achieve the target of increasing the Cropping Index (IP). Regarding Process Precision, a time lag was found in the distribution of assistance, alongside perceptual conflicts regarding farmer participation. Other inhibiting factors include budget constraints affecting assistance patterns and unequal access among farmer group members. The primary supporting factors are the flexibility of assistance patterns and the support of local actors. In conclusion, the Free Plowing Service Program has provided significant economic benefits to farmers but has not yet reached maximum effectiveness. For optimization, better synchronization of operational schedules, mitigation of rain-fed land constraints, improved transparency and communication with farmers, and strengthened budget allocation are required to maintain the quality and equitable distribution of assistance.

Keywords: Policy Effectiveness, Free Plowing Service, Agriculture, Tanah Datar.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan pilar utama perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, khususnya melalui komoditas padi sawah yang menjadi penopang hidup mayoritas masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas sektor ini mengalami guncangan akibat faktor alamiah dan struktural. Fenomena yang mengkhawatirkan terjadi di Kecamatan Tanjung Emas sebagai salah satu lumbung padi daerah, di mana luas panen terus menyusut dari 4.165,30 Ha pada tahun 2020 menjadi 3.507 Ha pada tahun 2022. Di luar faktor bencana alam, permasalahan persisten yang dihadapi petani adalah tingginya biaya operasional pengolahan lahan yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sewa alat mesin pertanian (Alsintan). Merespons hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2021 yang kemudian direvisi menjadi Perbup Nomor 54 Tahun 2022 tentang Program Layanan Bajak Gratis. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi petani kecil sekaligus meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) melalui mekanisasi lahan secara cuma-cuma.

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat kesenjangan (*gap*) antara klaim capaian makro kabupaten yang dinyatakan melampaui target dengan realitas mikro di lapangan. Di Kecamatan Tanjung Emas, penurunan luas panen justru tetap

terjadi di tengah berjalannya program, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan tersebut terhadap kondisi lokal. Studi terdahulu oleh Raihan dan Sujianto (2024) di Kecamatan Sungai Tarab menunjukkan kendala koordinasi teknis, sementara Oktafia dan Helmi (2025) di Kecamatan Lintau Buo melaporkan keberhasilan pengurangan biaya produksi sebesar 19,23%. Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus analisis di Kecamatan Tanjung Emas yang didominasi karakteristik lahan sawah tadah hujan serta penggunaan teori efektivitas kebijakan model 5T dari Riant Nugroho secara komprehensif. Dimensi 5T tersebut meliputi Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu memotret realitas sosiologis dan geografis masyarakat tani. Melalui analisis mendalam terhadap aspek "Tepat Lingkungan" dan "Tepat Target", penelitian ini bertujuan menggugat efektivitas layanan pada lahan yang bergantung pada iklim dan mengevaluasi inklusivitas data penerima manfaat. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah agar kebijakan ini benar-benar adaptif dan menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena efektivitas Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Tanjung Emas. Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi kebijakan berdasarkan dimensi 5T (Tepat Kebijakan, Pelaksana, Target, Lingkungan, dan Proses) sesuai teori Riant Nugroho. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) di Kecamatan Tanjung Emas, mengingat wilayah ini memiliki karakteristik lahan sawah tadah hujan yang spesifik dan mengalami penurunan luas panen yang signifikan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang meliputi aktor kunci dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Manajer Brigade Alsintan tingkat kecamatan,

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pengurus kelompok tani, serta petani penerima manfaat.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada para informan untuk menggali informasi terkait prosedur, hambatan, dan dampak program di lapangan. Observasi partisipatif dilakukan dengan meninjau langsung proses pembajakan lahan oleh Brigade Alsintan serta kondisi geografis persawahan di Nagari Koto Tengah dan Jorong Sungai Salak. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup pengumpulan regulasi (Perbup Nomor 54 Tahun 2022), laporan capaian program dari Dinas Pertanian, serta data statistik pertanian dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar untuk memperkuat validitas temuan.

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, peneliti memilah dan mengorganisir data hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan indikator efektivitas kebijakan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk mempermudah pemahaman alur implementasi program. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang divalidasi dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna menjamin keabsahan data. Proses ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan objektif dan mampu menjawab permasalahan mengenai efektivitas Program Layanan Bajak Gratis di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Tanjung Emas didasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2022. Berdasarkan temuan di lapangan, program ini diimplementasikan melalui tiga pola bantuan untuk mengakomodasi keberagaman kondisi petani, yaitu: bantuan operasional penuh oleh Brigade Alsintan, bantuan BBM bagi kelompok yang memiliki alat, serta bantuan upah bagi petani yang mengupahkan lahan kepada buruh tani. Secara

ekonomi, program ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya produksi petani. Berikut adalah perbandingan estimasi biaya pengolahan lahan sebelum dan sesudah adanya program berdasarkan temuan data di Kecamatan Tanjung Emas:

Tabel 4. 1. Perbandingan biaya produksi dalam Hasil Panen

Komponen	Sebelum Program	Sesudah Program	Penghematan / Kenaikan
Biaya Upah Bajak	Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000	Rp 0 (Gratis)	Hemat 100%
Biaya BBM & Operator	Mandiri (Tinggi)	Ditanggung Pemkab	Pengurangan Signifikan
Total Biaya Produksi	± Rp 8.000.000	± Rp 6.000.000 - Rp 6.500.000	Hemat ± 20-25%
Hasil Panen (GKP)	± 5,2 Ton	± 5,8 - 6,1 Ton	Naik ± 12-15%

Sumber: Manajer Bajak Gratis Tanjung Emas

Berdasarkan data yang dihimpun selama penelitian di Kecamatan Tanjung Emas, Program Layanan Bajak Gratis telah berhasil mengintervensi salah satu komponen biaya produksi tertinggi bagi petani. Dari hasil wawancara dengan informan di Nagari Koto Tangah dan Jorong Sungai Salak, penghematan biaya yang dirasakan petani berkisar antara Rp 1.200.000 hingga Rp 1.500.000 per hektar tergantung pada pola bantuan yang diterima. Namun, efektivitas dalam hal pengurangan biaya produksi ini ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan intensitas penanaman atau Indeks Pertanaman (IP). Data statistik menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, rata-rata petani di wilayah ini masih bertahan pada pola tanam IP 100 (sekali setahun) atau IP 200 (dua kali setahun) tanpa ada lonjakan ke IP 300. Hal ini diperkuat dengan data luas panen di Kecamatan Tanjung Emas yang justru mengalami penyusutan dari 4.165,30 Ha (2020) menjadi 3.507 Ha (2022). Kebijakan ini dapat dievaluasi melalui 5 hal yaitu :

1. Tepat Kebijakan

Dimensi ini menilai sejauh mana kebijakan yang dibuat (Perbup No. 54 Tahun 2022) mampu menjawab akar permasalahan petani. Di Kecamatan

Tanjung Emas, kebijakan ini dinilai tepat secara administratif karena berhasil mengintervensi salah satu komponen biaya produksi tertinggi, yaitu biaya pembajakan. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan makro untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Hal ini disebabkan karena intervensi pemerintah hanya fokus pada biaya "input" (bajak), sementara variabel produktivitas lain seperti ketersediaan air dan infrastruktur irigasi belum terintegrasi secara kuat dalam satu skema kebijakan yang sama.

2. Tepat Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan berkaitan dengan kinerja struktur Brigade Alsintan dan para aktor di lapangan. Secara kelembagaan, pelaksanaan di Kecamatan Tanjung Emas sudah terkoordinasi dengan baik melalui peran aktif Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan manajer tingkat kecamatan. Adanya fleksibilitas tiga pola bantuan (biaya operasional penuh, bantuan BBM, atau bantuan upah) menunjukkan bahwa pelaksana berusaha adaptif terhadap kebutuhan kelompok tani yang beragam. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan masih dibayangi oleh keterbatasan anggaran yang sering kali memaksa pelaksana memprioritaskan pola bantuan tertentu saja.

3. Tepat Target

Aspek ini mengevaluasi apakah manfaat program diterima oleh kelompok sasaran yang dimaksud. Revisi regulasi dari Perbup No. 56 Tahun 2021 ke Perbup No. 54 Tahun 2022 menunjukkan langkah positif menuju inklusivitas, di mana kriteria penerima manfaat diperluas dari sekadar berbasis data kemiskinan (DTKS) menjadi berbasis data SIMLUHTAN. Meskipun sudah lebih inklusif, di lapangan masih ditemukan ketimpangan akses di mana tidak semua anggota kelompok tani mendapatkan giliran bantuan secara merata, serta masih adanya petani mandiri yang belum terdata dalam sistem administrasi kelompok tani.

4. Tepat Lingkungan

Dimensi Tepat Lingkungan merupakan titik paling krusial sekaligus hambatan utama di Kecamatan Tanjung Emas. Kebijakan ini dinilai kurang tepat lingkungan karena bersifat seragam (*one-size-fits-all*), padahal karakteristik lahan di Tanjung Emas didominasi oleh sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan. Layanan bajak sering kali tidak dapat dioperasikan saat lahan mengeras di musim kemarau, dan ketiadaan strategi mitigasi khusus untuk lahan tadah hujan membuat efektivitas layanan menjadi rendah bagi petani di wilayah non-irigasi. Hal inilah yang menjelaskan mengapa luas panen justru menurun dari 4.165,30 Ha (2020) menjadi 3.507 Ha (2022) meskipun layanan bajak sudah digratiskan.

5. Tepat Proses

Dalam hal proses, ditemukan adanya kesenjangan waktu (*time lag*) antara jadwal pendaftaran dengan distribusi bantuan di lapangan. Keterlambatan layanan bajak yang tidak sesuai dengan masa tanam sering kali memaksa petani untuk kembali menggunakan jasa bajak komersial secara mandiri demi mengejar musim hujan. Selain itu, adanya konflik persepsi mengenai partisipasi petani dalam kegiatan sosialisasi yang berujung pada penangguhan bantuan dinilai menghambat proses distribusi layanan yang seharusnya bersifat edukatif dan melayani.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, dapat disimpulkan bahwa secara fungsional program ini telah memberikan dampak positif bagi ekonomi rumah tangga petani. Penggunaan teori 5T (Tepat Kebijakan, Pelaksanaan, Target, Lingkungan, dan Proses) menunjukkan bahwa efektivitas program ini berada pada kategori yang cukup membantu namun belum optimal secara produktivitas. Program ini sangat efektif dalam mengurangi beban modal awal petani, di mana penghematan biaya pengolahan lahan mencapai Rp 1.200.000 hingga Rp 1.500.000 per hektar. Hal ini menjadi instrumen perlindungan ekonomi yang krusial di tengah kenaikan harga BBM yang sempat melumpuhkan daya beli

petani kecil. Namun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat parsial. Secara teknis dan ekologis, program ini belum mampu mencapai target utamanya untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen di Kecamatan Tanjung Emas. Kegagalan ini berakar pada aspek ketidaktepatan lingkungan, di mana kebijakan pemberian bantuan bajak tidak disertai dengan mitigasi terhadap keterbatasan infrastruktur air pada lahan tadah hujan. Akibatnya, bantuan alat bajak gratis sering kali tidak dapat dimanfaatkan saat musim kemarau karena tanah yang mengeras, sementara di sisi lain, distribusi bantuan sering mengalami keterlambatan (*time lag*) yang tidak sinkron dengan masa tanam petani. Hal ini diperparah dengan masalah inklusivitas data di tingkat kelompok tani yang menyebabkan distribusi manfaat belum sepenuhnya merata bagi seluruh anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Alsintan Kepada Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian di Kabupaten Buleleng. *Jurnal/tulisan ilmiah lainnya*, Buleleng.
- Alhazra & Sujianto. (2024). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program Layanan Bajak Gratis Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal/tulisan ilmiah lainnya*, Tanah Datar.
- Amelia, D., Suandi, S., & Wahyuni, I. (2022). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Penggunaan Faktor Produksi Lahan Dan Benih Terhadap Kinerja Usahatani Padi Sawah Di Kabupaten Kerinci. *Journal of Agribusiness and Local Wisdom*, 5(1), 80–90.
- Amir, I. (2021). Analisis Efektivitas Program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Tingkat Petani. *Jurnal Ilmiah Agribisnis*.
- Candra, Dodi., Nasrul, Wedy., & Sari, Muhamad Reza. (Tahun Publikasi). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program Layanan Bajak Gratis Di Kabupaten Tanah Datar. *Menara Ilmu - Jurnal UMSB*.
- Darwis, V. (2019). Evaluasi Peanlaksana Sawah Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal/tulisan ilmiah lainnya*.
- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Fahmi dkk. (2020). Analisis Implementasi Program Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) Padi Melalui Optimalisasi Sumber Daya di Kabupaten Karawang.
- Hamzah & Syafri. (2023). Implementasi Program Kartu Tani untuk Subsidi Pupuk Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas di Kabupaten Agam. *Jurnal/tulisan ilmiah lainnya*, Agam.
- Infopublik.id. (2022, 2 Februari). *Ringankan Beban Petani, Bupati Tanah Datar Luncurkan Bajak Gratis*.

- Kominfo Tanah Datar. (2023, 4 Juli). *Juli 2023, Capaian Progul Bajak Gratis Tanah Datar Sebesar 33,17 Persen*. (Sumber Online).
- Mahmud, H., Sangadji, S. S., & Suhardi, S. (2021). Analisis produksi, konsumsi dan pemasaran usahatani padi di desa lembah asri kecamatan weda selatan kabupaten halmahera tengah. *Jurnal/tulisan ilmiah lainnya*.
- Muhammad. (2024). Implementasi Program Bajak Gratis Brigade Alsintan Bagi Petani Sebagai Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal/tulisan ilmiah lainnya*, Tanah Datar.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy: Sistem Politik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Pengendalian*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2018). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Oktafia, Nabila., & Helmi, Rahmadhona Fitri. (2025). Meningkatkan Potensi Pertanian Dengan Implementasi Program Layanan Bajak Gratis Di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Kajian Pemerintah*.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (2021). *Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Program Layanan Bajak Gratis*. Batusangkar: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (2022). *Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Program Layanan Bajak Gratis*. Batusangkar: Sekretariat Daerah.
- Pradana, G. W. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dalam Upaya Meningkatkan Produksi Padi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Raihan, M., & Sujianto, A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab). *Jurnal/tulisan ilmiah lainnya*.
- Rofiatul dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal/tulisan ilmiah lainnya*, Probolinggo.
- Siregar, A. P. (2018). Analisis Efisiensi dan Pendapatan Usahatani Padi Melalui Mekanisasi Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni. (2023). *Metode Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tahir, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan dan Pengawasan Alintan di Kabupaten. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 115–136.
- Wahab, Solichin Abdul. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo & Purwaningrum. (2022). Analisis Efektivitas Program Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Kediri. *Jurnal/tulisan ilmiah lainnya*, Kediri.

Yanti, M., Kusmiah, N., & Baso, A. (2020, May). Analisis Penggunaan Alsintan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah Di P4s Haji Ambona Yanda (Studi Kasus Desa Paku Kecamatan Binuang). In *Journal Pegguruang: Conference Series* (Vol. 2, No. 1, pp. 110-115).